

## Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung

Syamsiar I. Mahmud<sup>1\*</sup>  
STISIPOL Mujahidin

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Gadung, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengungkap fenomena dan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat yang melepas hewan peliharaannya di tempat umum sehingga dapat mengganggu lalu lintas dan membuat lingkungan menjadi kotor. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022. dengan melakukan wawancara, pengamatan serta mempelajari dokumen kebijakan penertiban hewan ternak dengan melakukan analisis data melalui reduksi dan penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kab. Buol, belum terlaksana dengan optimal, karena disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar dinas terkait, keterbatasan anggaran dan kurangnya pelaksanaan evaluasi.

**Keywords:** Kebijakan, Manajemen penertiban, hewan ternak

*Submitted:02-04-2022; Revised: 11-04-2022; Accepted:22-04-2022*

Corresponding Author: [iyhalbuchu@gmail.com](mailto:iyhalbuchu@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Peternakan memiliki banyak peran dalam mata pencaharian masyarakat dalam mengembangkan masyarakat<sup>1</sup>. Dalam mewujudkan tatanan kota/desa yang tentram dan tertib serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penataan, pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran. Pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat disuatu wilayah/daerah telah mengalami kemajuan dan perubahan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan dan kepadatan penduduk yang terus meningkat serta akses sosial ekonomi juga turut menjadi salah satu pendorong peningkatan daerah pedesaan. Akan tetapi semakin meningkatnya jumlah penduduk pedesaan menjadikan lahan hijau semakin sulit diperoleh, sehingga banyak ditemukan hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran di tempat umum yang pada dasarnya bukan diperuntukkan untuk kawasan hewan ternak. Karena sudah sulit mendapatkan lahan hijau sebagai salah satu sumber makanan hewan ternak seperti Sapi dan kambing, sementara penduduk/pemilik ternak sendiri mengalami kesulitan jika setiap harinya harus menyediakan pakan ternak untuk hewan peliharaannya. Akibatnya, saat ini kami mengalami beberapa masalah yang sulit diatasi. Artinya, terwujudnya desa yang bersih, sehat, dan tertib untuk mewujudkan ketentraman dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Buol Tahun 2020 bahwa jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Buol yang terdiri dari 11 Kecamatan yakni Kecamatan Lakea, Biau, Karamat, Momunu, Tiloan, Bokat, Bukal, Bunobogu, Gadung, Paleleh, dan Paleleh Barat. Memiliki 2 jenis ternak yakni Sapi dan kambing dengan jumlah mulai dari 582 ekor sampai dengan 5.333 ekor. Adapun jumlah populasi ternak di Kecamatan Gadung merupakan berada pada tingkat tertinggi ke lima dari 11 Kecamatan di Kabupaten Buol yakni sebesar 2.295 jenis Sapi sementara Kambing berjumlah 1.099. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Buol (ekor) Tahun 2020

No	Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kuda	Kambing	Domba	Babi
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Lakea	-	2 432	-	2 414	-	-
2.	Biau	-	582	-	1 814	-	8
3.	Karamat	-	1 193	-	2 290	-	-
4.	Momunu	-	4 187	-	2 568	-	129
5.	Tiloan	-	3 171	-	1 989	-	361
6.	Bokat	-	3 929	-	2 162	-	188
7.	Bukal	-	5 333	-	3 587	-	862
8.	Bunobogu	-	3 886	-	1 410	-	-
9.	Gadung	-	2 295	-	1 099	-	-
10.	Paleleh	-	2 093	-	1 144	-	240
11.	Paleleh Barat	-	1 416	-	677	-	-
	<b>Buol</b>		<b>30 517</b>	<b>-</b>	<b>21 154</b>	<b>-</b>	<b>1 788</b>

Sumber: Kabupaten Buol dalam Angka. 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingginya populasi ternak di setiap Kecamatan tentu berimplikasi pada potensi wilayah dari sisi keberadaan jumlah hewan maupun dari sisi ketersediaan bahan pakan. Potensi jenis hewan maupun kapasitas masing-masing wilayah kecamatan sangatlah dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah setempat. Penerapan kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Gadung belum terlaksana dengan baik karena masih kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Jumlah Hewan Terkena Razia Kecamatan Gadung Bulan Januari-Maret 2019

No	Desa	Bulan		
		Januari	Februari	Maret
1.	Bulagidun	23 Ekor	16 Ekor	9 Ekor
2.	Bulagidun Tanjung	16 Ekor	11 Ekor	4 Ekor
3.	Diapati	23 Ekor	17 Ekor	9 Ekor
4.	Labuton	21 Ekor	17 Ekor	10 Ekor
5.	Lipubogu	16 Ekor	13 Ekor	6 Ekor
6.	Lokodidi	20 Ekor	13 Ekor	9 Ekor
7.	Lokodoka	30 Ekor	26 Ekor	19 Ekor
8.	Matian	19 Ekor	16 Ekor	10 Ekor
9.	Nandu	7 Ekor	5 Ekor	2 Ekor
10.	Pandangan	17 Ekor	14 Ekor	9 Ekor
11	Taat	25 Ekor	17 Ekor	18 Ekor

Sumber: Kantor Camat Gadung, 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingginya hewan ternak yang terkena razia merupakan salah satu wujud kelalaian dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan penertiban hewan ternak dalam rangka mewujudkan daerah pedesaan yang bersih dan rapi, pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak di lapangan yang dilakukan oleh penegak Perda khususnya bagi penerapan sanksi yang diberikan bagi pemilik ternak hanya sampai pada tahap pemberian sanksi dan tidak sampai pada penyidikan, masih minimnya anggaran serta tingkat pendidikan yang kurang mendukung terhadap keberhasilan kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Buol menjadikan implementasi kebijakan ini kurang optimal serta Kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh beberapa instansi terkait dengan penertiban hewan ternak menjadi salah satu faktor kebijakan ini kurang terimplementasi di masyarakat. Untuk itulah perlu dilakukan langkah strategis untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak di Kecamatan Gadung yang terdiri dari: Perencanaan, Pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah panduan untuk bertindak, dan berkaitan dengan kerangka kerja yang lebih luas yang melibatkan penerapan filosofi, prinsip, visi, dan keputusan yang diterjemahkan ke dalam berbagai program, proyek, dan kegiatan. Sebuah kebijakan memerlukan pernyataan luas tentang tujuan dan tindakan di masa depan, dan mengungkapkan cara untuk mencapainya (Khan, A. R., & Khandaker, S, 2016). Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan privat yang dibuat oleh administrator negara dalam kerangka memecahkan masalah publik dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kebijakan publik selalu berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang diinginkan.

Mazmanian dan Sabatier memberikan gambaran langkah-langkah dalam melakukan intervensi kebijakan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 1) mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi. 2) Menegaskan tujuan yang hendak dicapai, dan 3) Merancang struktur proses implementasi. Dengan demikian untuk diimplementasikan maka program harus disusun dengan jelas. Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Selanjutnya, Proses atau tahapan kebijakan publik menurut Ripley: a. Penyusunan Agenda, Formulasi dan legitimasi kebijakan, Implementasi kebijakan, dan Evaluasi terhadap implementasi. (Kadji, 2015) memfokuskan lingkungan kebijakan pada dua variabel, yakni: variabel kebudayaan politik (*political culture variable*) dan variabel sosial ekonomi (*socio economic variable*).

### b. Implementasi Kebijakan

Studi implementasi, mau tidak mau, akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan-keputusan pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan. Implementasi diperlukan untuk menganalisis berbagai kebijakan (Igirisa, I., Rahman, M., Abdussamad, J., Abdusamad, Z., & Husain, A. K, 2020). Oleh sebab itu, tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan pakar kebijakan asal Afrika, Udoji dengan tegas pernah mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Abdul Wahab, 2017).

Danial A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan

pedoman- pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha - usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian - kejadian (Abdul Wahab, 2017)

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. (Akib, H, 2012).

Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu (atau kelompok) publik atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya." Di sini, implementasi kebijakan mengacu pada pencapaian tujuan kebijakan melalui perencanaan dan pemrograman operasi yang disepakati. Mereka memandang implementasi tidak hanya sebagai masalah manajerial atau administratif, tetapi sebagai proses politik yang berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan, bagaimana, di mana, dan dari siapa. Implementasi adalah evolusi jika orang bertindak untuk mengimplementasikan suatu kebijakan kemudian membawa perubahan (Chigudu, D, 2015).

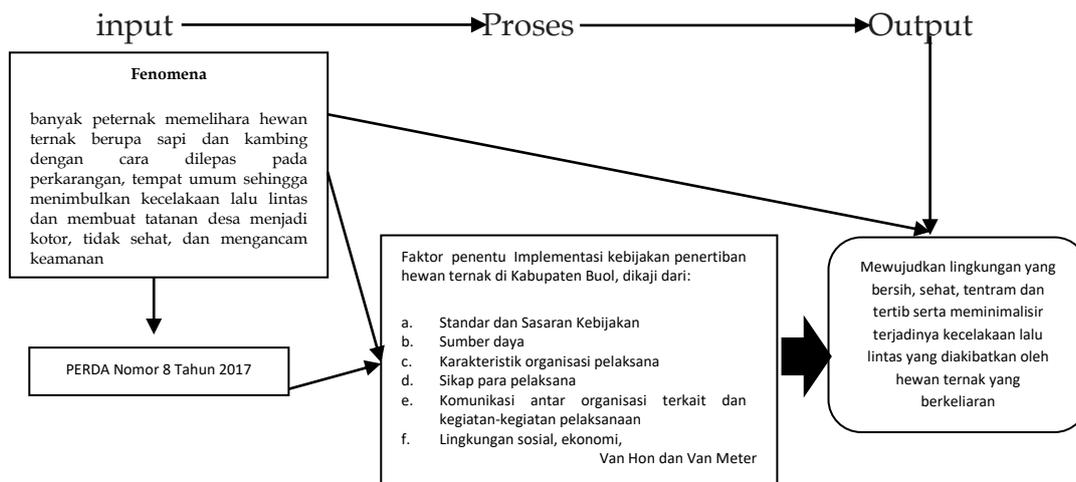
c. Model Implementasi Kebijakan Publik

- 1). Model George Edward III (1980) Edward III (Kadji 2015: 64) mengatakan "In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?" Untuk menjawab pertanyaan penting ini, maka Edward III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: "Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure".
- 2). Model Implementasi Van Horn dan Van Meter (1975) Model implementasi Van Horn dan Van Meter adalah Model yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Adapun variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam variabel yaitu: a. Standar dan sasaran kebijakan. b. Sumberdaya. c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. d. Karakteristik agen pelaksana e. Sikap/ kecenderungan (disposisi) para pelaksana f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

d. Penertiban Hewan Ternak

Melindungi serta mengamankan hewan ternak adalah salah satu cara agar hewan ternak peliharaan tidak lagi berkeliaran di perkarangan umum, jalan raya, pusat perkantoran, pasar, lahan pertanian warga dan tempat pariwisata. Sebab, dengan adanya hewan ternak seperti Sapi, Kerbau, Kambing dan lain sebagainya yang berkeliaran secara bebas ditempat umum akan menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Pengertian dari ternak adalah: "Ternak adalah hewan ternak yang produksinya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian". Steinfeld, et al. (2006) bersaksi bahwa populasi ternak yang besar adalah penyebab utama pencemaran lingkungan. Demikian pula, Gerber et al. (2010) mendokumentasikan fakta bahwa ternak menempati seperempat dari lahan yang muncul, merupakan penyumbang terbesar kelima dari gas rumah kaca antropogenik, menggunakan delapan persen dari total sumber daya air dan merupakan ancaman bagi berbagai spesies Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran. Adapun kerangka konseptual penelitian di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Kerangka Konseptual Penelitian

**METODOLOGI**

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gadung Kabupaten Buol adalah penelitian deskriptif kualitatif. melalui pengamatan terhadap aktivitas Pemerintah dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran. Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, maka peneliti melakukan wawancara secara mendalam pada informan yang mengetahui dan menjadi sasaran kebijakan ini dan melakukan studi pustaka terhadap berbagai referensi dan dokumen yang terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Pada

tahapan awal penelitian melakukan reduksi data yaitu mengumpulkan data sesuai fokus dan subfokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dan dideskripsikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan temuan dalam penelitian. Data yang dianalisis dilakukan pengabsahan data melalui teknik triangulasi data, perpanjangan pengamatan, penambahan referensi dan fokus group discussion

## **HASIL PENELITIAN**

Sebelum peneliti turun lapangan untuk meneliti tentunya peneliti perlu memahami lokasi penelitian dan siapa saja yang akan menjadi target. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah dimulai dari tahap pra penelitian untuk mencari data awal dari permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya melakukan penelitian sebagai tindak lanjut untuk mendapatkan data yang lebih kompleks selain mendapatkan data juga melakukan observasi, wawancara langsung baik secara struktur maupun wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi, data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilakukan reduksi data sesuai dengan fokus penelitian yang selanjutnya disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan.

- a. standar dan sasaran kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Buol telah dilaksanakan namun belum optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian pemberian denda kepada pemilik ternak yang melanggar sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2017 tentang penertiban hewan ternak.
- b. faktor sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan hewan ternak di Kabupaten Buol masih minim, minimnya sumber daya penegak Peraturan Daerah ditingkat Kabupaten disebabkan oleh tidak adanya tenaga Penyidik PNS (PPNS) sehingga prosedur penindakan hanya berhenti di tahap penerapan sanksi saja dan agen pelaksana ditingkat desa pun secara umum hanya memiliki latar belakang pendidikan SD, sehingga apa yang diinstruksikan atasan kurang dapat dipahami oleh agen pelaksana. Hal ini menimbulkan konflik antar pemilik ternak dengan tim penertiban hewan ternak di desa. Selain itu, tidak adanya anggaran yang disediakan Pemerintah di tahun ini, sehingga sangat besar terjadi potensi kegagalan implementasi kebijakan hewan ternak di Kabupaten Buol.
- c. faktor komunikasi dalam mengoptimalkan kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Buol sudah dilaksanakan namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh koordinasi antar Dinas terkait masih kurang khususnya ditingkat Kabupaten yang kurang berjalan dengan baik sehingga unsur kejelasan dan isi pesan dari kebijakan penertiban hewan ternak masih kurang memiliki kejelasan
- d. karakteristik organisasi agen pelaksana sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Buol telah dilaksanakan dengan membentuk satuan tugas khusus yang membidangi penertiban hewan ternak, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menata manajemen agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat tersebar pada masing-masing unit kerja

- e. sikap para pelaksana kebijakan penertiban hewan ternak telah dilaksanakan secara baik, namun tingkat kesungguhan dan kekontinuitasnya pelaksana kebijakan ini masih kurang optimal karena daya dukung anggaran yang masih minim dalam memberikan honor kepada tim pelaksana kebijakan penertiban hewan ternak tersebut
- f. faktor lingkungan sosial ekonomi sangat berperan dalam mendukung keberhasilan kebijakan hewan ternak di Kabupaten Buol, hal ini dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan pemilik ternak selaku kelompok sasaran dari kebijakan ini.

## PEMBAHASAN

### a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Gadung telah dilaksanakan namun belum optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian pemberian denda kepada pemilik ternak yang melanggar sebagaimana dijelaskan dalam Perda No 8 Tahun 2017 tentang penertiban hewan ternak. Bahwa pemberian denda kepada pemilik ternak bergantung pada ukuran dan jenisnya, jika yang terkena Razia adalah sapi dengan ukuran besar, maka besaran denda yang harus dibayar pemilik ternak adalah Rp 500.000 dan untuk hewan ternak yang berukuran kecil (kambing, kuda) dikenakan denda sebesar Rp 300.000. Untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat luas agar tidak ada permasalahan sosial yang ada di lingkungan mereka akibat dari hewan ternak liar. Van Horn dan Van Meter dalam (Agustino 2014). Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit di realisasikan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

### b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang paling mendasar terlaksananya kebijakan, jika program atau suatu kebijakan kurang didukung oleh anggaran dan petugas pelaksana maka kebijakan tidak akan berhasil. Hal ini pula sejalan dengan hasil penelitian bahwa sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Gadung masih minim, karena agen pelaksana belum memiliki tenaga PPNS dalam hal penindakan penertiban hewan ternak, sehingga pelaksanaan penertiban hewan ternak hanya sampai pada pemberian sanksi dan belum sampai ke tahap penyidikan. selain itu, faktor anggaran yang disediakan Pemerintah untuk penertiban hewan ternak hanya dianggarkan di tahun 2018, sementara di tahun 2019-2021 belum dianggarkan, sehingga sangat besar terjadi potensi kegagalan implementasi kebijakan hewan ternak di Kabupaten Buol. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dasril, (2017) hasil

penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan alokasi dana, sarana dan prasarana merupakan salah satu indikasi tidak adanya perataan dari Peraturan Daerah Kota Palu No 6 tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak. Dalam melaksanakan suatu kebijakan seharusnya didukung dengan sumber dana yang memadai, Tahir, (2014) Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wirawan, (2011) juga menjelaskan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan mensinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa SDM, sumber daya lainnya menganggur (idle) dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Kadji, (2014: 66) menjelaskan bahwa sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan.

c. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antar Dinas terkait untuk bersama-sama untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Gadung masih kurang optimal hal ini juga terlihat pada sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu mengandangkan hewan ternaknya agar tidak berkeliaran di tempat umum ataupun pelaksanaan sosialisasi khusus di tingkat desa masih sangat jarang dilaksanakan sehingga masyarakat belum memahami secara menyeluruh terkait dengan penerapan kebijakan penertiban hewan ternak sehingga unsur kejelasan dan isi pesan dari kebijakan penertiban hewan ternak masih kurang memiliki kejelasan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rusdin, (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam bentuk Sosialisasi yang selama ini diharapkan masyarakat sangat jarang dilakukan, bahkan beberapa tahun belakangan ini sudah tidak pernah ada sosialisasi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami kebijakan tersebut. Peneliti juga melihat bahwa aparat Kecamatan Palasa dan aparat desa masih jarang untuk melakukan sosialisasi melalui papan pengumuman, berupa informasi terkait dengan kebijakan penertiban ternak. Minimnya sosialisasi yang dilakukan aparat terkait, dalam hal ini aparat Kecamatan Palasa menyebabkan target dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai. Edward III dalam Tangkilisan (2003:12) mengatakan, agar implementasi program menjadi efektif, maka mereka yang tanggung jawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat, dan kebijakan ini mesti jelas, akurat, dan konsisten. Kadji, (2015) oleh sebab itu komunikasi sangat mempengaruhi implementasi dimana keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa harus dilakukan.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

karakteristik organisasi agen pelaksana sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Buol dilaksanakan dengan membentuk satuan tugas khusus yang membidangi penertiban hewan ternak dan dilaksanakan sesuai dengan SOP. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menata manajemen agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat tersebar pada masing-masing unit kerja sehingga memudahkan bagi pimpinan untuk menjalankan fungsi kontrol. Anggara, (2018) Pada dasarnya standar operasional prosedur (SOP) merupakan dimensi dari struktur birokrasi. Kejelasan substansi kebijakan dan standar operasional prosedur melaksanakan kebijakan menjadikan disposisi para pelaku kebijakan penertiban ternak akan semakin jelas.

e. Sikap Para Pelaksana

sikap para pelaksana kebijakan penertiban hewan ternak telah dilaksanakan secara baik, namun tingkat kesungguhan dan kekontinuitasnya pelaksana kebijakan ini masih kurang optimal karena daya dukung anggaran yang masih minim dalam memberikan honor kepada tim pelaksana kebijakan penertiban hewan ternak sehingga berpengaruh pada sikap para pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan penertiban hewan ternak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Indrayani, Malau (2019) sikap para pelaksana kebijakan dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaan kebijakan penertiban ternak lepas di Kabupaten Pesisir Selatan, akan tetapi pelaksana kebijakan melaksanakan penertiban masih terkendala dengan anggaran, minimnya anggaran membuat agen pelaksana kurang melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu tanpa dukungan anggaran yang memadai maka pelaksanaan kebijakan tidak akan tercapai.

f. Lingkungan sosial ekonomi

Lingkungan sosial ekonomi sangat berperan dalam mendukung keberhasilan kebijakan hewan ternak di Kabupaten Buol, hal ini dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan pemilik ternak selaku kelompok sasaran dari kebijakan ini dimana dengan diterapkannya kebijakan penertiban hewan ternak di tiga Kecamatan membuat lingkungan desa khususnya jalan raya menjadi lebih bersih dari kotoran-kotoran hewan ternak yang mengganggu kesehatan masyarakat, disamping itu dapat meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas akibat dari hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum, para petani pun ikut merasakan manfaat dari kebijakan ternak ini, karena dengan adanya kebijakan penertiban hewan ternak, tanaman para petani menjadi lebih aman karena semua hewan ternak telah dikandangkan, akan tetapi jumlah kandang yang disediakan masih sangat minim. Pada dasarnya, suatu kebijakan lahir dari suatu konflik yang terjadi, sehingga kebijakan tidak akan lepas dari faktor lingkungan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi, oleh sebab itu, output dari suatu kebijakan publik harus berpengaruh pada lingkungan, baik dari lingkungan sosial maupun ekonomi masyarakat, sebagaimana

dijelaskan oleh Anggara, (2018: 142) menjelaskan teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Faktor penentu implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak di Kab. Buol. dikaji dari: a). Standar dan sasaran kebijakan, b). Sumber daya, c). Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, d). arakteristik organisasi agen pelaksana, e). Sikap para pelaksana, f). Konsisi sosial ekonomi telah dilaksanakan namun masih belum optimal dari standar dan sasaran kebijakan yang belum sesuai dengan isi kebijakan karena masih terdapat ketidaksesuaian pemberian denda kepada pemilik ternak yang melanggar sebagaimana tertuang dalam isi kebijakan, minimnya sumber daya manusia terkait tenaga Penyidik PNS (PPNS) sehingga prosedur penindakan hanya berhenti di tahap penerapan sanksi saja, dan agen pelaksana ditingkat desa pun hanya hanya memiliki latar belakang pendidikan SD, sehingga apa yang diinstruksikan atasan kurang dapat dipahami oleh agen pelaksana, selain itu, pada aspek komunikasi, koordinasi antar Dinas terkait masih kurang khususnya ditingkat Kabupaten yang kurang berjalan dengan baik sehingga unsur kejelasan dan isi pesan dari kebijakan penertiban hewan ternak masih kurang memiliki kejelasan, sikap para pelaksana yang masih kurang sungguh-sungguh menjalankan kebijakan ini karena daya dukung anggaran yang masih minim dalam memberikan honor kepada tim pelaksana kebijakan penertiban hewan ternak tersebut

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari cakupan yang menjadi fokus penelitian, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya baik dari segi strategi yang harus dilakukan, maupun model penanganan lainnya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan dosen yang telah membantu mengarahkan dan menyumbangkan segala tenaga dan pikiran, dan yang paling special kepada seluruh informan di Kecamatan Gadung yang selalu menyempatkan waktunya demi terlaksananya penelitian ini dan teristiewa kepada kedua orang tua dan keluarga tercintaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Agustino. (2014). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

- Bachev, H. (2006). Penilaian Kebijakan Dukungan Pertanian dan Kemungkinan Dampak Implementasi CAP pada Struktur pertanian dan Keberlanjutan di Bulgaria. <https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/54318/1/72-4061.pdf>.
- Bachev, H. (2006). Assessment of Farm Support Policies and Likely Impact of CAP Implementation on Farm Structures and Sustainability in Bulgaria. <https://repository.kulib.kyotou.ac.jp/dspace/bitstream/2433/54318/1/724061.pdf>
- Chigudu, D. (2015). Navigating policy implementation gaps in africa: The case of Zimbabwe. *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions*, 5(3), 7-14. <https://doi.org/10.22495/rgcv5i3art1>
- Dasril Muhammad. 2017. Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak). *Jurnal Dialektika Volume 2, Nomor 1, Februari 2017*
- Gerber, P., Key, N., Portet, F., & Steinfeld, H. (2010). Policy options in addressing livestock's contribution to climate change. *Animal*, 4(3), 393-406. <https://doi.org/10.1017/S1751731110000133>
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Igirisa, I., Rahman, M., Abdussamad, J., Abdusamad, Z., & Husain, A. K. (2020). *Implementation of Development Policy for Livestock Farming Business in Gorontalo Regency , Gorontalo , Indonesia*. *Sys Rev Pharm* 2020-11(12), 138-142. <https://doi:10.31838/srp.2020.12.23>
- Kadji Yulianto, M.Si. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo. UNG Press
- Parsons, Wayne. (2006). *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sahya Anggara. (2018) *Kebijakan Publik. Cetakan ke 2*. ISBN: 978-979-076-487-3. Bandung: CV. Pustaka
- Steinfeld, H. et al. (2006). *Livestock's Long Shadow*. FAO Rome.
- Tahir Arifin, M.Si. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Jakarta: Raja Grafindo Persada